

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan internasional adalah bentuk interaksi antara negara-negara maupun aktor non-negara yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional yang tidak dapat dicapai secara mandiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap negara dapat menjalin kerja sama dengan negara lain.¹ Kerja sama dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik bilateral, regional, maupun multilateral. Salah satu contoh kerja sama yang telah berlangsung lama adalah kemitraan antara Amerika Serikat dan Israel.

Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel dimulai pada tahun 1948, ketika Amerika Serikat menjadi negara pertama yang mengakui Israel sebagai negara merdeka.² Situs resmi pemerintah Amerika Serikat juga menyebutkan bahwa Amerika Serikat adalah negara pertama yang mengakui Israel pada tahun 1948, serta negara pertama yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017.³ Israel telah lama menjadi mitra strategis utama yang paling dapat diandalkan oleh Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Kedua negara ini memiliki hubungan yang kuat, didasari oleh ikatan sejarah, budaya, dan kepentingan bersama.

Konflik antara Israel dan Palestina bermula sejak Israel memproklamasikan

¹ A.A, Perwita. Dan Y.M., Yani. "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional". Cetakan keempat

² "U.S. Relation with Israel : Bilateral Relations Fact Sheet, Bureau Of Near Eastern Affairs " , January 20, 2021, <https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3581.htm>, diakses pada 25 Januari 2024.

³ <https://www.archives.gov/milestone-document/press-release-announcing-us-recognition-of-israel>, diakses pada 25 Februari 2024.

kemerdekaannya pada 14 Mei 1948.⁴ Konflik antara Israel dan Palestina telah menjadi isu yang terus memengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah hingga saat ini. Masalah ini juga menjadi fokus perhatian dunia dan berbagai organisasi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berupaya mencari solusi terbaik melalui serangkaian pertemuan di berbagai badan yang ada di dalam organisasi tersebut, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua pihak, Israel dan Palestina.⁵

Pada hubungan internasional, untuk mencapai kepentingan nasional, tidak selalu hanya melalui kerja sama. Pada kenyataannya, dalam upaya mewujudkan tujuan nasional, sering kali timbul konflik yang tidak dapat dihindari. Konflik ini bisa terjadi akibat perbedaan kepentingan nasional antar negara serta perbedaan nilai yang dianut. Perbedaan kepentingan tersebut sering kali saling bertentangan dalam praktiknya.⁶ Salah satu konflik yang telah berlangsung lama dalam hubungan internasional adalah perselisihan atas kota suci Yerusalem antara Palestina dan Israel. Status Yerusalem merupakan isu yang sangat sensitif dan kontroversial dalam konflik antara negara Arab dan Israel. Selain menjadi simbol eksistensi bagi kedua belah pihak, posisi Yerusalem juga sangat strategis, dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta banyaknya aset penting yang terletak di sana.⁷

Dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam konflik ini sudah berlangsung

⁴ Anwar, I.C. "Perang Palestina vs Israel Apa Itu Intifada I dan II dalam Sejarah Konflik Palestina & Israel ? " , 21 Mei 2021, <https://tirto.id/apa-itu-intifada-i-dan-ii-dalam-sejarah-konflik-palestina-israel-gf8J> , diakses pada 02 Mei 2024.

⁵ Muhammad, Badry, Muntasyir, " Peran Aktif Amerika Serikat Era Joe Biden Dalam Konflik Palestina dan Israel " , PIR Journal, Vol. 7 No. 1 Agustus 2022 Hal 01-12, e-ISSN : 2721-0510 | p-ISSN : 2528-7192.

⁶ Silvi Oktaviani, " Kepentingan Amerika Serikat dalam pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel tahun 2017" , Global Political Studies Journal, Vol 5, No. 1, Edisi April 2020.

⁷ " The Strategic Importance Of Jerusalem" , <https://jiss.org.il/en/the-strategic-importance-of-jerusalem> , diakses pada 25 Januari 2024.

sejak lama karena adanya pengaruh lembaga *American Israel Public Affairs Committee* (AIPAC) yang didirikan oleh seorang jurnalis Yahudi yang lahir di Kanada bernama Isaiah L. Kenen pada tahun 1959 ketika pemerintahan Eisenhower berkuasa.⁸ Sebelumnya organisasi ini bernama *The American Zionist Council* (AZC) yang didirikan pada tahun 1951, merupakan sebuah kelompok lobi asing yang terdaftar secara resmi dan memiliki kegiatan lobi yang berfokus pada lembaga eksekutif. Pada tahun 1953-1954 namanya telah berubah menjadi *The American Zionist Committee for Public Affairs* (AZCPA). Hal ini dilakukan untuk dapat mengarahkan seluruh personel yang dimiliki oleh AIPAC dalam setiap kegiatan lobi pembuatan kebijakan Amerika Serikat terkait Israel.⁹

Kenen akhirnya memperluas upaya lobi pembuatan kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Israel tersebut hingga ke lembaga legislatif Amerika Serikat dan melebarkan lingkup AZCPA dalam rangka mempromosikan bantuan jangka panjang, pembangunan ekonomi dan kebijakan pertahanan nasional negara Israel.¹⁰ Saat itu, AIPAC masih tergolong sebagai kelompok lobi dengan sebuah operasi kecil-kecilan dengan staf dan anggota seadanya. Namun, memasuki awal tahun 1960-an, kegiatan politik Yahudi terorganisasi secara terbuka dengan sendirinya untuk memperjuangkan negara Israel.¹¹ Selain itu, pengaruh zionis pun meningkat selama masa pemerintahan presiden Kennedy dan Jhonson, kekayaan dan pengaruh tokoh-tokoh Yahudi dalam masyarakat Amerika Serikat telah meningkat.

⁸ Michael G. Bard, Will "Israel Survive ?" (New York : Palgrave Macmillan, 2007) hal 207.

⁹ Mathew M. Caverly, "American – Israel Public Affairs Committee", Political parties, Interest Groups, and organization that Shapes America : An encyclopedia and Documents Collection. Hal. 3. Diakses pada 25 Januari 2024.

¹⁰ Iqbal, Ramadhan. "Lobi Israel Dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Ke Timur Tengah", *Intermestic : Journal Of International Studies*, e-ISSN.2503-443X, Volume 1, No.2, Mei 2017 (144-165), doi : 10.24198/intermestic.vol. 1no. 2.

¹¹ Stuart Eizenstat. "Loving Israel, Warts, and All". *Foreign Policy* 81, 1990-1991, Hal 92.

Hal ini terjadi karena selama pemerintahan Kennedy dan Jhonson mereka dikelilingi oleh orang Yahudi antara lain penasihat-penasihat dekat, para donor dan teman-teman pribadi mereka, inilah yang menyebabkan Amerika Serikat sudah berpihak dengan Israel sedari dulu.¹² Hal ini merupakan sikap Realisme dari Amerika Serikat terhadap Israel. Di masa awal terbentuknya kelompok lobi AIPAC dalam kehidupan politik modern Amerika Serikat, kelompok lobi ini hanyalah inisiatif dari seorang pria bernama I.L.Kenen. AIPAC memanfaatkan situasi Amerika Serikat yang tengah berperang melawan tindakan terorisme dengan cara membentuk AIPAC yang memiliki komitmen kuat untuk mempererat, melindungi, dan mempromosikan hubungan antara Amerika Serikat dan Israel dengan cara meningkatkan keamanan kedua negara.¹³

Kerja sama yang terjalin memiliki keuntungan bagi kedua belah pihak, AIPAC mendorong para anggota kongres untuk mendukung negara Israel melalui bantuan luar negeri, kerja sama pemerintahan, mendukung upaya anti-terorisme dan mempromosikan perdamaian melalui solusi dua negara yang mengatakan bahwa negara Yahudi Israel berdampingan dengan negara demiliterisasi Palestina. Selain mampu mempengaruhi anggota kongres dan para senator, AIPAC juga berperan dalam pemilihan umum anggota AIPAC, anggota AIPAC yang akan dipilih ini adalah pelobi-lobi kebijakan Amerika Serikat yang terdiri dari para politisi dan tokoh Yahudi untuk memperkuat hubungan Amerika Serikat dan Israel, termasuk dalam pembuatan kebijakan yang menguntungkan pemerintah Tel Aviv.¹⁴

¹² J.J. Goldberg, *Jewish Power : Inside the American Jewish Establishment*. (New York : Basic Books,1996) Hal. 158.

¹³ Website Resmi AIPAC, diakses pada 25 Januari 2024 melalui <https://www.aipac.org/about-aipac/mission>.

¹⁴ <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/29506/BAB%20V.pdf>, diakses pada 13 Mei 2024.

Klaim Israel mengenai Yerusalem sebagai ibu kotanya di ikuti dengan Parlemen Israel mengeluarkan undang-undang yang disebut *Basic Law : Jerusalem, Capital Of Israel* pada tahun 1980. Isi dari undang-undang tersebut berbunyi bahwa Yerusalem yang lengkap dan satu, merupakan ibu kota Israel. Di kota itu juga akan berkedudukan Presiden, Knesset (Parlemen Israel), Mahkamah Agung dan Pemerintahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merespon tindakan yang dilakukan oleh Perlemen Israel tersebut melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang mengeluarkan resolusi 478 pada tahun 1980.¹⁵ Puncak baru permasalahan sengketa terkait status Yerusalem terjadi pada Rabu 6 Desember 2017, ketika Donald Trump, dalam pidatonya di Gedung Putih mengejutkan dunia dengan mendeklarasikan bahwa Yerusalem sebagai ibukota dari Israel. hal ini dilakukan setelah beberapa hari Donald Trump terpilih sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat. Hal ini mendapat protes dari PBB yang menganggap keputusan ini dapat mengganggu kestabilan kawasan Timur Tengah.¹⁶

1.2. Rumusan Masalah

Pengklaiman Israel mengenai Yerusalem sebagai ibu kota negaranya ini, telah dikeluarkan oleh Parlemen Israel melalui undang-undang yang disebut sebagai *Basic Law : Jerusalem Capital Of Israel* pada tahun 1980, akan tetapi isi undang-undang ini dianggap melanggar resolusi 478 pada tahun 1980 yang dikeluarkan oleh PBB mengatakan bahwa Yerusalem merupakan wilayah yang berada dibawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). sehingga dapat dikatakan bahwa Yerusalem tak dapat diakui sepihak saja. Pada masa

¹⁵ Allam, A.H. “ Faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi Presiden Donald Trump untuk mengakui status kota Yerusalem sebagai ibukota Israel”, *Journal of International Relations* , Hal 441-447, 2019.

¹⁶ The White House. 2017, “*National Security Strategy Of The United States*” diakses pada 13 Mei 2024.

pemerintahan Donald Trump, Yerusalem akhirnya diakui sebagai ibu kota Israel dengan memindahkan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem pada tahun 2017 silam, tetapi pengakuan dari Amerika Serikat merupakan pengakuan sepihak dan tidak diakui secara menyeluruh oleh pihak internasional salah satunya PBB.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan ialah “ Apa kepentingan Amerika Serikat dalam mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel?”

1.4 .Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kepentingan Amerika Serikat dalam mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan studi Hubungan Internasional bagi mahasiswa, terutama bagi mahasiswa Hubungan Internasional khususnya dalam konteks Kebijakan Luar Negeri dan Kepentingan Nasional Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam konflik Palestina – Israel.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai perspektif Mahasiswa Unand terhadap Kepentingan Nasional Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam konflik Palestina-Israel.

1.6. Tinjauan Pustaka

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti berupaya mengumpulkan

informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber dan menemukan sejumlah referensi yang dijadikan dasar dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Referensi pertama ialah penelitian yang berjudul “Lobi Israel Dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Ke Timur Tengah”.¹⁷ Artikel ini ditulis oleh Iqbal Ramadhan, menjelaskan dan membahas tentang peran kelompok lobi Israel yang mendominasi dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur-Tengah pada masa pemerintahan George W Bush. Dalam artikel ini juga menjelaskan enam elemen dalam negeri yang sangat berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yaitu: *The White House, The Executive Branch, The Legislative Branch, Political Parties, Opinion Makers* dan *The Lobbies*. Lebih lanjut artikel tersebut menjelaskan bahwa kelompok lobi yang berperan dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat ke Timur Tengah adalah mereka yang pro-Israel.

Jhon Mearsheimer mendeskripsikannya sebagai kelompok lobi Israel tiga di antara kelompok lobi Israel terkuat adalah *The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)*, *Anti-Defamation League (ADL)*, dan *The Zionist Organization Of America (ZOA)*, ketiganya adalah kelompok lobi yang memiliki pengaruh kuat serta dapat memengaruhi kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh eksekutif dan legislatif di Amerika Serikat.

Referensi selanjutnya adalah artikel yang berjudul “Peran Aktif Amerika Serikat Era Joe Biden Dalam Konflik Palestina Dan Israel”. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Badry Muntasyir. Artikel ini menjelaskan tentang Konflik antara Palestina dan Israel telah berlangsung lebih dari lima dekade dan masih belum

¹⁷ Ramadhan, Iqbal, “Lobi Israel Dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Ke Timur Tengah”, *Intermestic Journal Of International Studies*, e-ISSN. 2503-443X, Volume 1, No. 2, Mei 2017.

mencapai penyelesaian hingga sekarang. Konflik ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk teologi, ekonomi, dan politik, yang telah menarik perhatian dunia internasional, mendorong perlunya campur tangan dari negara-negara lain untuk mencari solusi. Amerika Serikat, sebagai negara yang memiliki kekuatan dominan global, telah lama berperan sebagai mediator dalam konflik ini. Namun, kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat sering berubah seiring dengan pergantian kepemimpinan di negara adidaya tersebut.¹⁸

Referensi berikutnya adalah artikel penelitian Zefanya Kharisma Nugroho yang berjudul “Kebijakan Luar Negeri Pro-Israel Amerika Serikat di Pemerintahan Obama: Perubahan Lanskap Pembuat Kebijakan”. Artikel ini menjelaskan tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang selama ini selalu pada pihak Israel perlahan mulai bergerak ke arah yang berlawanan, Obama dan Netanyahu seringkali tidak sepaham akan beberapa permasalahan yang timbul dalam dinamika Timur Tengah, khususnya pasca JCPOA dan tentang *two-state solution* yang digagas pemerintahan Obama. Pergeseran kebijakan Amerika Serikat dengan Israel ini disebabkan oleh kondisi perpolitikan dalam negeri. Pertama, Obama berbeda dengan Netanyahu yang konservatif, merupakan pemimpin yang lebih liberal dan menjalankan pemerintahan dengan pendekatan yang berbeda dengan Bush di masa sebelumnya. Selain itu, terdapat pergeseran pemain dalam pembuatan kebijakan luar negeri *lobby* Israel tidak lagi dikuasai oleh hegemon tunggal AIPAC, kehadiran *J Street* dengan tawaran *two state solution* mampu mempengaruhi pendekatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada era

¹⁸ Muntasyir, Badry, Muhammad. “Peran Aktif Amerika Serikat Era Joe Biden Dalam Konflik Palestina Dan Israel” “, PIR Journal, Vol. 7, No. 1 Agustus 2022 Hal. 01-12, e-ISSN : 2721-0510 | p-ISSN : 2528-7192.

kepemimpinan Obama.¹⁹

Referensi berikutnya yaitu penelitian yang berjudul “Keputusan Donald Trump Tentang Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibukota Israel”. Artikel penelitian ini ditulis oleh Ladia Aisah Andriana. Artikel penelitian ini menjelaskan tentang sejarah konflik Palestina dengan Israel, Yerusalem sebagai titik konflik Palestina dengan Israel, dan sudut pandang Amerika Serikat terhadap konflik Palestina dengan Israel. Serta artikel penelitian ini juga menjelaskan bagaimana keterlibatan Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik Palestina dengan Israel pada masa kepemimpinan Presiden Bill Clinton, Presiden George W. Bush, Presiden Barack Obama, dan Presiden Donald Trump.²⁰

Referensi kelima adalah artikel penelitian yang berjudul “Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel”.²¹ Artikel penelitian ini ditulis oleh Aos Firdaus dan Yanyan Mochamad Yani dan menjelaskan bahwa beberapa faktor penghambat perdamaian konflik Palestina-Israel, terutama hambatan internal dari kedua pihak. Israel dihadapkan pada friksi internal antara dua pihak, dimana kelompok pertama menginginkan eksistensi Israel sebagai negara kuat sebagai *raison d’etre* eksistensi Israel itu sendiri dan kelompok kedua yang ingin menempuh jalan perdamaian yang mengarah kepada pembentukan negara Palestina merdeka. Sementara di pihak Palestina, hambatan untuk mencapai kemerdekaan Palestina dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu adanya konflik

¹⁹ Nugroho, Kharisma, Zefanya. “Kebijakan Luar Negeri Pro-Israel Amerika Serikat Di Pemerintahan Obama : Perubahan Lanskap Pembuat Kebijakan”, <https://www.researchgate.net/publication/371139568>, Mei 2023, diakses pada 05 Desember 2023.

²⁰ Ladia, Aisah, Andriana. “Keputusan Donald Trump Tentang Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel”, Universitas Jember, diakses pada 10 September 2023

²¹ Firdaus Yuli Aos, Yani Mochamad Yanyan. “Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel “, Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora, p-ISSN : 2460-4208, e-ISSN : 2549-7685, Volume 5, No 1, Tahun 2020.

antara Fatah dan Hamas yang menghalangi kekuatan Palestina dalam mencapai kemerdekaan hakiki dari Israel.

1.7. Kerangka Pemikiran

Sebuah kerangka terkait operasionalisasi teori ataupun konsep yang relevan bermanfaat sebagai instrumen untuk menganalisis permasalahan yang hendak diteliti, sehingga dapat menyajikan jawaban yang terperinci terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model kepentingan nasional oleh Charles Chong-Han Wu sebagai basis untuk menjelaskan kepentingan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dalam konflik Palestina-Israel.

1.7.1 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional (national interest) merupakan sebuah konsep utama hubungan internasional yang mencakup kepentingan politik, kepentingan keamanan, kepentingan ekonomi, kepentingan budaya, dan kepentingan lain suatu negara. Dengan kedaulatan negara sebagai inti, kepentingan politik suatu negara merefleksikan sebagian besar kepentingan nasionalnya dan keamanan nasional merupakan kepentingan nasional yang paling mendasar. Konsep kepentingan nasional mencerminkan persepsi mendasar terhadap komposisi kepentingan nasional, signifikansinya, tujuannya, nilai-nilainya dan cara mewujudkan nilai-nilai tersebut. Sebagai bagian integral dari pemikiran strategis, konsep kepentingan nasional akan memberikan dampak yang besar pada pembentukan dan implementasi strategi nasional.²²

²² Zongyi Liu, "The Concept of National Interests," *China's Diplomacy* (December 9, 2013): 121–

Sebagai sebuah konsep yang bermakna luas, terdapat beragam tokoh maupun ahli yang mendefinisikan kepentingan nasional. Hans J. Morgenthau selaku pionir awal mendefinisikan kepentingan nasional sebagai kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Atas dasar itu, pemimpin negara mengeluarkan kebijakan spesifik yang ditujukan ke negara lain yang sifatnya kerja sama atau konflik.²³

Felix E. Oppenheim mengemukakan bahwa kepentingan nasional adalah tujuan kesejahteraan pemerintahan nasional di tingkatan internasional, termasuk menjaga otonomi politik dan integrasi teritorial. Secara praktik, *national interest* disinonimkan dengan *national security*.²⁴ Kepentingan nasional dikatakan oleh James N. Rosenau dapat dipergunakan sebagai alat analisis. Konsep kepentingan nasional bermanfaat untuk mendeskripsikan, menjelaskan, maupun mengevaluasi baik sumber maupun outcome dari kebijakan luar negeri sebuah negara. Sementara itu, apabila digambarkan sebagai praktik politis, kepentingan nasional dapat digunakan untuk membenarkan, mencela, ataupun memberi usulan terkait kebijakan negara.²⁵

Meskipun demikian, Charles Chong-Han Wu berpandangan bahwa konsep kepentingan nasional menjadi sukar dipahami manakala kita hanya mengaplikasikan satu indikator untuk merepresentasikan kepentingan negara seperti yang konsisten dilakukan oleh para ahli hubungan internasional. Wu

189, https://doi.org/10.1142/9781938134395_0003, 121

²³ Hans J. Morgenthau, *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy* (Ann Arbor, MI: UMI Books on Demand, 2006)

²⁴ Felix E. Oppenheim, "National Interest, Rationality, and Morality," *Political Theory* 15, no. 3 (August 1987): 369–389, <https://doi.org/10.1177/0090591787015003006>

²⁵ Terence Joseph lih, *The Idea of the National Interest: A Conceptual Analysis in the Context of the Gulf War* (Vancouver: Faculty of Graduate Studies, Department of Political Science, University of British Columbia, 1995), 55

mengamini pernyataan Joseph Nye bahwa pengertian kepentingan nasional merupakan “*slippery concept*” yang memerlukan analisis yang lebih multidimensional.²⁶ Kepentingan negara tidak hanya bertumpu pada pembentukan kekuasaan atau keamanan semata seperti yang diyakini mahzab realis, tetapi juga mencakup kepentingan perekonomian negara. Di samping dua domain utama tersebut, terdapat jenis kepentingan ketiga yang disebut kepentingan komunitas.

Oleh karena kepentingan nasional haruslah terdiri dari sejumlah tujuan umum dan indikator-indikator kebijakan tersendiri, Wu menyajikan kerangka konkret terkait struktur dan muatan dari kepentingan negara. Wu mengajukan sebuah model kepentingan nasional secara lebih terstruktur dan komprehensif dengan membaginya ke tiga dimensi vital, yaitu kepentingan keamanan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan komunitas. Masing-masing dimensi mempunyai indikatornya tersendiri. Indikator dari kepentingan keamanan ialah aliansi, kapabilitas nasional, dan nuklir. Kemudian, indikator dari kepentingan ekonomi ialah perdagangan, keterbukaan, dan *Foreign Direct Investment* (FDI). Selanjutnya, indikator dari kepentingan komunitas ialah demokrasi, pembangunan, dan *Intergovernmental Organization* (IGO).²⁷

Charles Chong-Han Wu mengemukakan bahwa dalam analisis konfirmatori faktor, peneliti menguji model faktor hipotetis dengan hasil yang signifikan secara statistik, yang berarti menggunakan variabel yang ada untuk mengonfirmasi model. Salah satu keunggulan analisis konfirmatori faktor yaitu menunjukkan penyempurnaan metodologis dengan mengonfirmasi kesalahan pengukuran. Hal

²⁶ Joseph S. Nye, "Redefining National Interest," *Foreign Affairs* 78, no. 4 (Juli/Agustus 1999): 22- 35

²⁷

tersebut bertujuan untuk menunjukkan cara mengonseptualisasikan gagasan tentang kepentingan nasional dengan ketepatan teoretis dan empiris. Wu mengusulkan bahwa penerapan analisis konfirmatori faktor membantu peneliti untuk membuat model yang lebih baik yang sesuai dengan makna sebenarnya dari kepentingan nasional.²⁸

Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing dimensi utama kepentingan nasional beserta indikator-indikatornya berdasarkan model kepentingan nasional menurut Charles Chong-Han Wu.²⁹

1) Kepentingan keamanan (*security interest*)

Kepentingan keamanan diartikan sebagai tindakan yang perlu diambil oleh negara dalam upaya untuk menjamin keberlangsungan hidup (*survival*)-nya. Terdapat beragam cara bagi suatu negara untuk mengungkapkan kepentingan keamanannya, yaitu melalui tanda-tanda yang kaya akan informasi yang pada dasarnya merupakan perilaku negara itu sendiri. Negara akan lebih menekankan pada upaya meningkatkan kapabilitas nasional, membentuk aliansi, atau bahkan mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir untuk mengatasi kekhawatiran keamanannya manakala terdapat masalah keamanan di wilayah sekitarnya. Sehubungan dengan itu, terdapat tiga indikator yang dikonstruksi untuk melihat dan menjelaskan dimensi kepentingan keamanan negara, di antaranya :

a. Aliansi (*alliances*)

Aliansi secara umum adalah perjanjian formal antara dua pihak atau lebih

²⁸ Charles Chong-Han Wu, Understanding the Structures and Contents of National Interests: An Analysis of Structural Equation Modeling, 391-420.

²⁹ Charles Chong-Han Wu, Understanding the Structures and Contents of National Interests: An Analysis of Structural Equation Modeling, 391-420

untuk bermitra atau bekerja sama demi suatu tujuan bersama. Namun, di dalam studi ini, aliansi sebagai indikator kepentingan keamanan berfokus pada aliansi militer oleh negara yang diarahkan untuk tujuan-tujuan keamanan yang spesifik. Aliansi di sini juga termasuk baik itu aliansi defensif maupun ofensif. Sebagai pilihan berdaulat yang didasarkan pada alasan bernegara, keputusan untuk membentuk aliansi merupakan salah satu rasionalitas strategis, yakni dengan menyatukan sarana militer dan tujuan politik.

b. Kapabilitas nasional (*national capabilities*)

Kapabilitas nasional sebagai indikator dalam dimensi kepentingan keamanan negara merujuk pada hard power atau militer yang dimiliki oleh suatu negara. Wu menyarankan untuk melihat kapabilitas nasional dengan mengacu pada *The Composite Index of National Capability* (CINC) sebagai cara untuk mengevaluasi sumber daya yang dimiliki suatu negara untuk mendukung perang. Metrik tersebut menguji berbagai kriteria untuk menunjukkan apakah suatu negara mempunyai sumber daya yang tersedia untuk mendukung power-nya di kancah dunia, yaitu dengan menggunakan rata-rata persentase total dunia dalam enam komponen yang merepresentasikan kekuatan demografis, ekonomi, dan militer.

c. Kepemilikan senjata nuklir (*nuclear weapons possession*)

Kepemilikan senjata nuklir dapat dipahami sebagai salah satu indikator dimensi kepentingan keamanan suatu negara dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai aspek keamanan nasional, di antaranya stabilitas strategis, pertahanan nasional, pengaruh diplomatik, jaminan keamanan, pencegahan tindakan koersif, bahkan prestise dan identitas nasional. Secara

keseluruhan, kepemilikan senjata nuklir merupakan variabel kompleks dalam dimensi kepentingan keamanan suatu negara yang mempengaruhi kalkulasi strategis, hubungan diplomatik, dan persepsi keamanan baik di tataran domestik maupun internasional.

2). Kepentingan ekonomi (*economic interest*)

Kepentingan ekonomi diklasifikasikan oleh Wu sebagai dimensi vital dalam konsepsi kepentingan nasional diilhami oleh pemikiran kaum liberal yang menyatakan bahwa suatu negara tidak hanya peduli pada kepentingan keamanan semata, tetapi juga kepentingan ekonominya. Seperti yang dinyatakan oleh Charles Lipson, kerja sama internasional lebih cenderung dilakukan di bidang isu ekonomi dibandingkan di bidang keamanan.³⁰ Sehubungan dengan itu, diskusi antara kaum neoliberal dan neorealis menyediakan kita informasi bahwa prioritas tujuan negara adalah untuk *survive* melalui pemeliharaan keamanan nasional sekaligus kesejahteraan ekonomi. Secara umum, kepentingan ekonomi mengacu pada unsur-unsur yang ditekankan oleh para ekonom politik, yaitu yang sangat berperan penting dalam menjaga tatanan dunia. Negara-negara yang memiliki lebih banyak kepentingan ekonomi dapat mengutamakan pengejaran peluang perdagangan bebas, pasar terbuka, dan investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/*FDI).

a. Perdagangan internasional (*international trade*)

Perdagangan internasional mengacu pada pertukaran barang dan jasa antarnegara yang melintasi batas negara dan melibatkan pembelian dan penjualan

³⁰ Charles Lipson, "International Cooperation in Economic and Security Affairs," *World Politics* 37, no. 1 (October 1984): 1–23, <https://doi.org/10.2307/2010304>.

produk di pasar internasional. Perdagangan internasional berguna sebagai indikator dalam hal ini karena merefleksikan pengejaran kepentingan ekonomi suatu negara dengan memfasilitasi akses ke pasar, sumber daya dan teknologi, mendorong pertumbuhan ekonomi, spesialisasi dan diversifikasi, menarik investasi asing, hingga membina hubungan diplomatik melalui interdependensi ekonomi.

b. Keterbukaan pasar (market openness)

Derajat keterbukaan pasar berfungsi sebagai indikator untuk menjelaskan kepentingan ekonomi negara karena merefleksikan kesediaan negara untuk terlibat dalam perdagangan internasional, investasi asing, dan pendorongan pertumbuhan ekonomi melalui akses ke pasar dan persaingan global.

c. Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI)

FDI mengacu pada investasi yang dilakukan oleh entitas asing dalam bisnis atau aset di suatu negara. FDI merupakan indikator pemenuhan kepentingan ekonomi negara karena merefleksikan daya tarik yang berusaha ditonjolkan negara terhadap investor asing yang pada akhirnya akan merangsang pertumbuhan ekonomi domestik.

3). Kepentingan komunitas (*community interest*)

Jenis ketiga yang menjadi perhatian kebijakan yang terhubung pada nilai-nilai inti dari kepentingan nasional menurut Wu ialah kepentingan komunitas. Ide yang diilhami oleh karya Karl Deutsch ini memercayai bahwa identifikasi yang timbal balik oleh negara melalui institusi dan rasa kebersamaan yang saling menguatkan

satu sama lain menjadi sesuatu yang tidak hanya relevan secara instrumental, tetapi juga menjadi bagian integral dari tujuan masing-masing.³¹ Negara-negara akan cenderung lebih mudah untuk menghasilkan kepentingan yang sama manakala mereka tergabung ke dalam organisasi yang sama ataupun mempunyai kesamaan ideologi. Oleh karena pentingnya membangun nilai dan identitas yang sama, negara yang berbagi kemiripan ideologi atau institusi akan melahirkan kepentingan kebijakan yang serupa pula. Karena itu, dimensi kepentingan komunitas mempunyai kekuatan eksplanasi yang signifikan terkait bagaimana negara mengambil keputusan kebijakan luar negerinya. Berikut ialah indikator kepentingan komunitas:

a. Organisasi antarpemerintah (*Intergovernmental Organization/IGO*)

Indikator ini merujuk pada keanggotaan negara yang bersangkutan di organisasi internasional. Negara-negara yang berbagi keanggotaan organisasi antarpemerintah ataupun aliansi lebih cenderung memiliki kepentingan komunitas yang sama karena adanya kesamaan tujuan, nilai, norma, interaksi reguler, kerangka institusional, mutual benefit, dan upaya kolektif untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di suatu kawasan atau aliansi.

b. Pembangunan (*development*)

Indikator pembangunan dapat diukur dengan kehadiran dan efektivitas mekanisme berbasis pasar dalam suatu negara. Indikator utama pembangunan domestik dapat mencakup institusi pasar, liberalisasi ekonomi, integrasi global,

³¹ Karl Deutsch, *Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Experience* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1957)

pengembangan sumber daya manusia, dan infrastruktur. Faktor-faktor tersebut secara kolektif berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan kesejahteraan sosial dalam suatu negara.³⁵ Negara-negara dengan komitmen dan standar pembangunan yang serupa lebih mungkin menghasilkan keputusan yang sama dalam mencapai kepentingan komunitas.

c. Demokrasi (*democracy*)

Tingkat demokrasi atau tipe rezim suatu negara juga berfungsi sebagai indikator pemenuhan kepentingan komunitas. Negara-negara demokrasi cenderung menyelaraskan tindakan mereka dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi baik dalam urusan domestik maupun internasional.

Berdasarkan uraian tentang model kepentingan nasional oleh Charles Chong-Han Wu di atas, peneliti telah mengaplikasikannya sebagai basis untuk menganalisis dan menjelaskan kepentingan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dalam konflik Palestina-Israel.

1.8. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian dimaknai sebagai serangkaian cara atau tindakan sistematis, logis, dan rasional yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Metodologi penelitian juga diberi pengertian sebagai ilmu terkait penyusunan penelitian yang terdiri dari hal-hal teknis dan mekanisme dalam

merealisasikan dari yang sifatnya pemikiran hingga dituangkan ke dalam tulisan.³²

1.8.1. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mengeksplorasi dan memahami sebuah fenomena secara mendalam melalui pengkajian perspektif, pengalaman, dan konteks dari partisipan.³³ Adapun jenis dari penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitis. Artinya, fenomena yang terjadi selanjutnya dianalisis untuk menemukan dan mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan.

1.8.2. Batasan penelitian

Batasan penelitian ini digunakan agar penelitian tetap dalam lingkup pembahasannya dan tidak meluas ke berbagai bahasan yang nantinya akan menjauh dari pokok permasalahan, maka peneliti akan menetapkan batasan untuk penelitian ini dalam kurun waktu 2017-2023. Semenjak Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat dan memasuki gedung putih pada 2017 telah menunjukkan keberadaannya yang sangat mendukung Israel yang dibuktikan dengan Donald Trump mengakui bahwa Yerussalem merupakan ibu kota Israel bahkan kedutaan Amerika Serikat di Tel Aviv dipindahkan ke Yerussalem dan hingga saat ini konflik Palestina-Israel masih sangat eksis dan lagi-lagi Amerika Serikat memperlihatkan posisinya yang Pro-Israel.

³² Mohtar Mas'ood, Ilmu Hubungan International: Disiplin Dan Metodologi (Jakarta: Penerbit PT Pustaka LP3ES, 1994).

³³ Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2013

1.8.3. Unit Analisis dan Tingkat Analisis

Menurut Mochtar Mas'ood unit Analisis merupakan objek yang dimana perilakunya akan dianalisis yang disebut sebagai variabel dependen³⁴. Variabel dependen atau unit analisis dalam penelitian ini adalah Kepentingan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam konflik Palestina-Israel karena, Kepentingan Amerika Serikat yang Pro- Israel dalam konflik Palestina- Israel akan menjadi objek yang penelitian deskripsikan. Adapun unit ekplanasi atau variabel independen yang akan mempengaruhi dan berdampak terhadap unit analisis yang perilakunya akan diamati³⁵. Sehingga, unit ekplanasi dalam peneltian ini adalah Konflik Palestina – Israel. Tingkat analisis dalam penelitian juga sangat perlu guna memperoleh level analisis yang tepat, selain itu tingkat analisis juga dapat membantu kita memilah – milah faktor yang ditentukan. Mochtar Mas'ood telah mengidentifikasi lima tingkat analisis diantaranya adalah individu, kelompok, negara-bangsa, kelompok negara dan sistem internasional. Tingkat analisis penelitian ini berada pada tingkat Kelompok Negara- bangsa karena, masalah penelitian yang disoroti adalah keterlibatan 3 negara dalam konflik ini yakni, Amerika Serikat, Palestina, dan Israel.³⁶

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Library Research* atau studi

³⁴ Bobby, Firdaus, Usman, “Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Kerja Sama Indonesia Dengan Inggris Di Bidang Keamanan Siber Tahun 2018” | (MJIR) Moestopo Journal International Relations, Volume 1, No, 2, September 2021, hal 107-112

³⁵ Bobby, Firdaus, Usman, “Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Kerja Sama Indonesia Dengan Inggris Di Bidang Keamanan Siber Tahun 2018” | (MJIR) Moestopo Journal International Relations, Volume 1, No, 2, September 2021, hal 113.

³⁶ Mas'ood, “Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi”, hal 41.

kepustakaan guna sebagai rujukan / referensi peneliti, yang terdiri dari Jurnal, Laman Berita, website, dan chanel sosial media yang memberitakan tentang Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam konflik Palestina – Israel. serta Data Sekunder ini guna meneliti apa saja yang tercantum dalam Studi kepustakaan tersebut untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik analisis data berupa pengelompokkan data, Reduksi data, interpretasi dan penyajian data, dan pengambilan keputusan.

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan sebagai bahan untuk menemukan *gap research*, kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis data yang akan mendapatkan hasil penelitian, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, batasan masalah penelitian, unit dan tingkat analisis penelitian, teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II. SEJARAH KONFLIK PALESTINA DAN ISRAEL

Pada bagian ini peneliti menjelaskan sejarah konflik Palestina-Israel, bagaimana konflik Palestina-Israel bisa terjadi, berapa jumlah korban jiwa dan apa saja yang

terjadi dalam konflik Palestina-Israel 2017-2023.

BAB III. BENTUK-BENTUK TINDAKAN AMERIKA SERIKAT MENGAKUI YERUSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL.

Pada bagian ini peneliti menjelaskan apa saja bentuk-bentuk tindakan yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat ketika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, serja juga menjelaskan apa saja tindakan Amerika Serikat dalam konflik Palestina-Israel, bentuk tindakan dalam konflik ini bisa dalam bentuk apakah Amerika Serikat menyuplai senjata kepada Israel, memberikan bantuan militer kepada Israel ataupun melakukan kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah lainnya.

BAB IV. KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT MENGAKUI YERUSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL.

Bab ini menjelaskan apa saja kepentingan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam konflik Palestina-Israel, apakah memiliki kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan hegemoni, ataupun kepentingan keamanan.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir ini berisikan tentang rangkuman kesimpulan terpenting dan saran secara umum terkait penulisan topik penelitian.

